



PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PROMOSI LAYANAN PERPUSTAKAAN DPRD SUMATERA BARAT : ANALISIS KONTEN DAN DAMPAKNYA

Leony Dwi Safitri¹, Marlini², Rini Asmara³

Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang

Email : leonydwi834@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi layanan Perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Barat, meliputi bentuk konten yang disajikan, strategi pengelolaannya, serta dampaknya terhadap pemanfaatan layanan perpustakaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Informan penelitian terdiri atas pengelola perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Barat, staf humas atau pengelola media sosial DPRD, serta pengguna perpustakaan yang memperoleh informasi layanan melalui media sosial. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan layanan dan kegiatan perpustakaan kepada publik, terutama melalui akun media sosial resmi DPRD. Konten yang disajikan meliputi dokumentasi kegiatan, informasi koleksi, dan pengenalan layanan perpustakaan. Namun, pemanfaatan media sosial tersebut belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan perencanaan konten, kapasitas sumber daya manusia, dan belum adanya indikator evaluasi yang terstruktur. Dampak pemanfaatan media sosial lebih terlihat pada peningkatan kesadaran pengguna terhadap keberadaan perpustakaan dibandingkan peningkatan pemanfaatan layanan secara langsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana promosi layanan perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Barat, namun diperlukan strategi pengelolaan yang lebih terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna agar dampaknya lebih optimal.

Kata kunci: media sosial, promosi perpustakaan, perpustakaan DPRD, layanan perpustakaan, penelitian kualitatif

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of social media as a promotional tool for library services at the Regional House of Representatives (DPRD) Library of West Sumatra Province, focusing on content characteristics, management strategies, and their impact on library service utilization. The research employs a qualitative approach using in-depth interviews. The informants consist of library managers of the DPRD of West Sumatra Province, public relations or social media administrators of the DPRD, and library users who obtained information about library services through social media. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that social media has been used to introduce library services and activities to the public,

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI :

[10.8734/Kohesi.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/Kohesi.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : Kohesi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



primarily through the official social media accounts of the DPRD. The content includes activity documentation, information on collections, and introductions to library services. However, the use of social media has not been optimized due to the lack of systematic content planning, limited human resource capacity, and the absence of structured evaluation indicators. The impact of social media utilization is more evident in increasing user awareness of the library rather than directly increasing service usage. This study concludes that social media has significant potential as a promotional medium for the DPRD Library of West Sumatra Province, but more strategic, sustainable, and user-oriented management is required to maximize its impact.

Keywords: social media, library promotion, DPRD library, library services, qualitative research

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara lembaga publik menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Transformasi digital mendorong institusi pemerintahan untuk tidak lagi mengandalkan media konvensional, melainkan memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi yang lebih efektif, cepat, dan luas jangkauannya (Arif, 2019). Dalam konteks ini, media sosial menjadi salah satu platform strategis yang memungkinkan penyebaran informasi secara real time sekaligus membuka ruang interaksi dua arah antara lembaga dan masyarakat. Perpustakaan sebagai bagian dari lembaga pelayanan publik juga terdampak oleh perkembangan tersebut. Perpustakaan modern dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku pencarian informasi masyarakat yang kini lebih banyak bergantung pada perangkat digital dan media sosial (Islamy, 2020). Perubahan ini menuntut perpustakaan untuk tidak hanya berperan sebagai penyedia koleksi, tetapi juga sebagai institusi yang aktif mempromosikan layanan dan sumber informasinya melalui kanal digital yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

Pemanfaatan media sosial oleh perpustakaan di Indonesia semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dimanfaatkan sebagai sarana promosi koleksi, penyebaran informasi layanan, serta publikasi kegiatan literasi (Laksmiwati, 2021). Media sosial dinilai efektif karena mampu menjangkau generasi muda yang cenderung kurang tertarik pada media promosi konvensional dan jarang mengunjungi perpustakaan secara langsung. Perpustakaan instansi pemerintah memiliki peran yang strategis dalam mendukung transparansi informasi dan peningkatan literasi masyarakat. Perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai perpustakaan khusus di lingkungan lembaga legislatif daerah, tidak hanya melayani kebutuhan informasi anggota dewan dan aparatur sekretariat, tetapi juga berpotensi menjadi sumber informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan, regulasi, dan pembangunan daerah (Novita, 2025). Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena masih terbatasnya strategi promosi layanan perpustakaan kepada masyarakat luas.

Salah satu kendala utama yang dihadapi perpustakaan instansi adalah rendahnya tingkat pemanfaatan layanan oleh pengguna. Penelitian di beberapa perpustakaan khusus menunjukkan bahwa minimnya promosi dan sosialisasi menjadi faktor dominan rendahnya kunjungan dan penggunaan koleksi perpustakaan (Rini, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan perpustakaan yang memadai dari sisi fasilitas dan koleksi belum cukup jika tidak didukung oleh strategi komunikasi dan promosi yang efektif. Media sosial menawarkan peluang besar bagi perpustakaan DPRD Sumatera Barat untuk meningkatkan visibilitas layanan dan membangun citra positif di mata masyarakat. Melalui konten visual dan narasi yang informatif, perpustakaan



dapat memperkenalkan koleksi, layanan, serta perannya dalam mendukung kinerja legislatif daerah (Prameswari, 2024). Selain itu, media sosial memungkinkan perpustakaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batasan ruang dan waktu.

Namun demikian, efektivitas pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi sangat bergantung pada kualitas konten yang disajikan. Penelitian menunjukkan bahwa konten yang bersifat informatif, edukatif, dan dikemas secara kreatif cenderung mendapatkan tingkat keterlibatan pengguna yang lebih tinggi dibandingkan konten yang hanya bersifat pengumuman administratif (Dari, 2023). Oleh karena itu, analisis konten menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pesan yang disampaikan perpustakaan mampu menarik perhatian dan minat audiens. Selain aspek konten, dampak penggunaan media sosial juga perlu dianalisis secara komprehensif. Dampak tersebut tidak hanya diukur dari jumlah pengikut atau tingkat interaksi, tetapi juga dari perubahan perilaku pengguna dalam memanfaatkan layanan perpustakaan (An-Nadzir, 2024). Dengan demikian, penelitian tentang pemanfaatan media sosial harus mampu menjelaskan hubungan antara aktivitas promosi digital dan peningkatan penggunaan layanan perpustakaan secara nyata.

Penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia lebih banyak berfokus pada perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan umum daerah. Kajian mengenai perpustakaan legislatif, khususnya di tingkat provinsi, masih relatif terbatas (JIPUS, 2023). Padahal, perpustakaan DPRD memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, terutama terkait dengan fungsi kelembagaan dan segmentasi penggunaannya. Akun media sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat, khususnya Instagram, telah digunakan sebagai sarana publikasi kegiatan kelembagaan. Namun, pemanfaatannya sebagai media promosi layanan perpustakaan belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini penting untuk mengetahui jenis konten apa saja yang dipublikasikan, bagaimana pola penyajiannya, serta sejauh mana konten tersebut berdampak pada peningkatan kesadaran dan pemanfaatan layanan perpustakaan (Yuliani, 2025).

Selain itu, pengelolaan media sosial perpustakaan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital. Pustakawan tidak hanya dituntut menguasai pengelolaan koleksi, tetapi juga keterampilan komunikasi digital dan pembuatan konten kreatif (Harih, 2022). Tanpa dukungan kapasitas SDM yang memadai, pemanfaatan media sosial berpotensi tidak optimal dan tidak berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi layanan perpustakaan DPRD Sumatera Barat merupakan isu yang penting dan relevan untuk dikaji. Analisis konten dan dampak penggunaan media sosial diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas strategi promosi yang telah dilakukan serta menjadi dasar penyusunan rekomendasi pengelolaan media sosial perpustakaan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan pengguna (Prameswari, 2024).

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian promosi perpustakaan di lingkungan lembaga legislatif daerah serta kontribusi praktis bagi pengelola perpustakaan DPRD Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas layanan dan keterjangkauan informasi kepada masyarakat (Novita, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi layanan perpustakaan DPRD Sumatera Barat, khususnya terkait strategi pengelolaan konten dan dampaknya terhadap pemanfaatan layanan perpustakaan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2021).

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan mengenai pengalaman, pandangan, dan penilaian mereka terhadap penggunaan media sosial dalam



promosi layanan perpustakaan. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data yang lebih rinci dan mendalam dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya (Moleong, 2022).

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian terdiri dari pustakawan atau pengelola perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Barat, staf humas atau pengelola media sosial DPRD, serta pengguna perpustakaan yang pernah memperoleh informasi layanan perpustakaan melalui media sosial. Pemilihan informan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan dampak pemanfaatan media sosial (Arikunto, 2020).

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan. Model wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti memiliki kerangka pertanyaan yang terarah, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan jawaban secara luas sesuai dengan pengalaman mereka. Pertanyaan wawancara difokuskan pada tujuan penggunaan media sosial, jenis konten yang dipublikasikan, strategi promosi yang diterapkan, respons pengguna, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan media sosial perpustakaan (Satori, 2021). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan guna memastikan konsistensi dan kebenaran data yang dikumpulkan. Dengan triangulasi, data yang diperoleh diharapkan lebih akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Sugiyono, 2021).

Data hasil wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, seperti strategi konten, efektivitas promosi, dan dampak terhadap pemanfaatan layanan perpustakaan (Miles, 2019). Keabsahan data penelitian dijaga melalui uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Uji kredibilitas dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara data yang disampaikan dan interpretasi peneliti. Uji dependabilitas dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, sedangkan uji konfirmabilitas dilakukan dengan memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data lapangan, bukan pada asumsi peneliti (Moleong, 2022).

Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi layanan perpustakaan DPRD Sumatera Barat serta menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif bagi pengelola perpustakaan dalam meningkatkan efektivitas promosi layanan di era digital.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan sembilan informan kunci yang terdiri dari tiga pustakawan/pengelola perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dua staf humas/pengelola media sosial DPRD, dan empat pengguna perpustakaan yang pernah mengetahui layanan melalui unggahan di media sosial DPRD. Analisis data wawancara menunjukkan beberapa temuan utama: (1) motif dan tujuan pemanfaatan media sosial untuk promosi perpustakaan, (2) karakteristik konten dan pola pengunggahan, (3) hambatan pengelolaan dan kapasitas SDM, (4) dampak terhadap pemanfaatan layanan perpustakaan, serta (5) persepsi pengguna dan rekomendasi praktis. Temuan ini selanjutnya didukung oleh literatur mengenai strategi komunikasi organisasi dan promosi layanan perpustakaan di era digital (Arif, 2019).

Pertama, motif pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dipandang oleh pengelola sebagai upaya untuk meningkatkan visibility perpustakaan kepada publik luas sekaligus menjawab perubahan pola akses informasi masyarakat. Seorang pustakawan



menyatakan, “Kami melihat media sosial sebagai jalan tercepat agar masyarakat tahu bahwa perpustakaan DPRD juga punya layanan yang bisa dimanfaatkan, bukan hanya dokumen internal.” Pernyataan ini sejalan dengan gagasan bahwa perpustakaan harus beradaptasi dengan perilaku pencarian informasi yang kini banyak dilakukan melalui platform digital (Islamy, 2020). Informan humas menambahkan, “Akun DPRD sudah punya audiens; daripada informasinya hanya internal, kami memanfaatkan akun itu untuk menyebarkan informasi perpustakaan,” yang mengindikasikan strategi pemanfaatan kanal kelembagaan yang lebih besar untuk menjangkau khalayak lebih luas (Prameswari, 2024).

Kedua, terkait karakteristik konten dan pola pengunggahan, hasil wawancara menunjukkan bahwa jenis konten yang dipublikasikan meliputi pengumuman koleksi baru, dokumentasi kegiatan literasi, liputan kunjungan, serta infografis singkat tentang layanan. Namun, pola pengunggahan bersifat insidental dan belum terencana dalam bentuk kalender konten khusus. Seorang pustakawan mengatakan, “Biasanya kalau ada kegiatan baru, kami dokumentasikan lalu kirim ke humas; belum ada jadwal rutin khusus untuk konten perpustakaan.” Temuan ini konsisten dengan studi yang menyebut bahwa keberadaan digital tanpa perencanaan konten yang sistematis seringkali mengurangi efektivitas promosi (Dari, 2023). Selain itu, humas menyampaikan bahwa prioritas unggahan masih didominasi oleh kegiatan legislatif sehingga konten perpustakaan mendapat porsi terbatas dalam jadwal unggahan (Novita, 2025).

Ketiga, wawancara mengungkap hambatan utama dalam pengelolaan media sosial perpustakaan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memahami pembuatan konten digital, keterbatasan anggaran untuk produksi materi multimedia, dan kurangnya pedoman atau kebijakan internal terkait pengelolaan akun kelembagaan. Seorang pengelola menyatakan, “Kami punya pustakawan yang kompeten di bidang koleksi, tetapi belum semua punya kemampuan membuat konten visual atau menyusun strategi media sosial.” Hal ini menguatkan literatur yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pustakawan dalam literasi digital dan pembuatan konten (Harih, 2022). Selain itu, aspek koordinasi antara perpustakaan dan humas DPRD menjadi tantangan operasional karena belum ada SOP yang mengatur alur pengiriman materi dan prioritas konten (An-Nadzir, 2024).

Keempat, mengenai dampak pemanfaatan media sosial terhadap pemanfaatan layanan perpustakaan, temuan bersifat campuran. Secara kuantitatif, informan humas melaporkan peningkatan perhatian publik pada pos-pos tertentu (misalnya pengumuman koleksi langka atau kegiatan literasi), yang tercermin dari jumlah like dan komentar, namun peningkatan kunjungan fisik ke perpustakaan belum signifikan. Seorang pengguna menyampaikan, “Saya jadi tahu ada koleksi baru dari Instagram DPRD, tapi belum sempat datang karena jam layanan yang terbatas.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa awareness dapat meningkat melalui media sosial, tetapi konversi menjadi penggunaan fisik layanan dipengaruhi faktor lain seperti jam buka, akses lokasi, dan proses layanan (SW Dari, 2023). Temuan ini mendukung klaim bahwa kampanye digital akan lebih efektif jika diintegrasikan dengan kegiatan offline yang memudahkan audiens memanfaatkan layanan secara nyata (Prameswari, 2024).

Kelima, wawancara juga mengungkapkan persepsi pengguna terhadap kualitas konten. Pengguna yang diwawancarai mengapresiasi konten berbentuk visual informatif dan cerita singkat (storytelling) yang memuat latar belakang koleksi atau manfaat praktis bagi pengguna. Seorang pengguna menyampaikan, “Konten yang paling menarik buat saya itu yang menampilkan cuplikan buku dan penjelasan singkat mengapa buku itu penting.” Hal ini selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa konten edukatif yang dikemas secara kreatif cenderung memperoleh engagement lebih tinggi (JIPUS, 2023). Namun, pengguna juga mengeluhkan tempo respons apabila mereka mengajukan pertanyaan melalui komentar atau direct message; biasanya respons membutuhkan waktu beberapa hari karena harus melalui jalur resmi humas (Rini, 2024).



Keenam, terkait evaluasi efektivitas, informan menyatakan bahwa saat ini monitoring performa dilakukan secara sederhana (menghitung likes, komentar, dan jumlah share) namun belum terukur melalui indikator yang terstruktur seperti engagement rate, click-through ke katalog online, atau konversi kunjungan fisik. Salah satu pustakawan menyatakan, “Kami belum punya indikator yang jelas untuk mengukur dampak unggahan terhadap pemanfaatan layanan; biasanya hanya lihat respon di postingan.” Ketiadaan metrik yang sistematis ini memperlihatkan kebutuhan untuk mengembangkan parameter evaluasi yang relevan bagi perpustakaan kelembagaan (Miles, 2019).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa rekomendasi praktis muncul dari informan. Pertama, pentingnya penyusunan kalender konten bersama antara perpustakaan dan humas untuk memastikan kontinuitas dan keberagaman konten. Seorang staf humas mengusulkan, “Kalau ada jadwal konten, kami bisa alokasikan slot untuk promosi perpustakaan secara rutin.” Kedua, peningkatan kapasitas pustakawan melalui pelatihan pembuatan konten multimedia dan strategi komunikasi digital agar produksi konten dapat dilakukan lebih mandiri (Moleong, 2022). Ketiga, perlu dibuat SOP alur koordinasi pengiriman materi dan respons terhadap pertanyaan publik agar interaksi menjadi lebih cepat dan profesional (Sugiyono, 2021).

Secara teoretis, temuan ini mendukung pandangan bahwa media sosial merupakan alat promosi yang potensial bagi perpustakaan kelembagaan, namun efektivitasnya bergantung pada perencanaan konten, kapabilitas SDM, integrasi dengan aktivitas offline, dan mekanisme evaluasi yang jelas (Arif, 2019). Secara praktis, perpustakaan DPRD Sumatera Barat dapat meningkatkan pemanfaatan layanan melalui strategi yang mengutamakan kontinuitas konten, penguatan kapasitas internal, dan pengukuran dampak yang terstruktur. Hasil wawancara ini diharapkan menyediakan bukti empiris yang dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan pengelolaan media sosial perpustakaan di lingkungan DPRD serta rujukan bagi penelitian lanjutan yang ingin menguji intervensi peningkatan kapasitas dan kalender konten terhadap indikator pemanfaatan layanan.

PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini difokuskan pada interpretasi temuan hasil wawancara mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi layanan perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan menelaah kesesuaian temuan lapangan terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu. Pembahasan mencakup aspek tujuan pemanfaatan media sosial, karakteristik konten promosi, strategi pengelolaan, hambatan yang dihadapi, serta dampak penggunaan media sosial terhadap pemanfaatan layanan perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan media sosial oleh perpustakaan DPRD Sumatera Barat didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku pencarian informasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa lembaga pelayanan publik perlu melakukan transformasi digital agar tetap relevan dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas (Arif, 2019). Media sosial dipahami oleh pengelola perpustakaan sebagai sarana komunikasi yang cepat, murah, dan memiliki jangkauan luas dibandingkan media promosi konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kehadiran digital sudah mulai terbentuk di lingkungan perpustakaan DPRD.

Pemanfaatan akun media sosial resmi DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai kanal promosi perpustakaan mencerminkan strategi adaptif dalam keterbatasan sumber daya. Karena perpustakaan belum memiliki akun media sosial khusus, kolaborasi dengan humas DPRD menjadi pilihan praktis untuk memperkenalkan layanan perpustakaan kepada publik. Strategi ini selaras dengan konsep komunikasi organisasi yang menekankan pemanfaatan saluran komunikasi institusional untuk menyampaikan pesan yang relevan kepada pemangku kepentingan



(Prameswari, 2024). Namun demikian, ketergantungan pada akun kelembagaan juga menimbulkan konsekuensi berupa keterbatasan ruang dan prioritas unggahan.

Dari sisi karakteristik konten, hasil penelitian menunjukkan bahwa konten promosi perpustakaan masih didominasi oleh dokumentasi kegiatan dan pengumuman layanan. Konten tersebut bersifat informatif, namun belum sepenuhnya dikemas secara kreatif dan persuasif. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa banyak perpustakaan di Indonesia masih menggunakan media sosial sebatas sebagai papan pengumuman digital, bukan sebagai sarana komunikasi strategis yang interaktif (Dari, 2023). Akibatnya, potensi media sosial untuk membangun keterlibatan pengguna secara aktif belum dimanfaatkan secara optimal.

Minimnya perencanaan konten dalam bentuk kalender unggahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas promosi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa unggahan konten perpustakaan bersifat insidental dan bergantung pada adanya kegiatan tertentu. Padahal, teori manajemen media sosial menekankan pentingnya konsistensi dan kontinuitas konten untuk menjaga perhatian audiens dan membangun citra institusi secara berkelanjutan (Miles, 2019). Ketidakteraturan unggahan dapat menyebabkan rendahnya visibilitas konten perpustakaan di linimasa pengguna.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pengelolaan media sosial perpustakaan. Pustakawan di lingkungan DPRD Sumatera Barat pada umumnya memiliki kompetensi dalam pengelolaan koleksi dan layanan informasi, namun belum semuanya memiliki keterampilan dalam pembuatan konten digital dan strategi komunikasi media sosial. Hal ini memperkuat pandangan bahwa peran pustakawan di era digital mengalami perluasan, dari pengelola informasi menjadi komunikator informasi yang aktif di ruang digital (Harih, 2022). Tanpa peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan media sosial berpotensi stagnan dan tidak berkembang.

Selain keterbatasan SDM, hasil penelitian juga mengungkap belum adanya pedoman atau standar operasional prosedur khusus terkait promosi perpustakaan melalui media sosial. Kondisi ini berdampak pada kurang jelasnya pembagian peran antara perpustakaan dan humas DPRD dalam proses perencanaan, produksi, dan evaluasi konten. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa ketiadaan kebijakan internal sering kali menjadi penghambat optimalisasi media sosial di lembaga pemerintahan (An-Nadzir, 2024). Tanpa SOP yang jelas, promosi perpustakaan cenderung bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif individu.

Dari perspektif dampak, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial mampu meningkatkan kesadaran pengguna terhadap keberadaan perpustakaan dan layanannya. Beberapa pengguna mengaku mengetahui informasi koleksi dan kegiatan perpustakaan melalui unggahan di media sosial DPRD. Temuan ini mendukung teori bahwa media sosial efektif dalam meningkatkan awareness dan memperluas jangkauan informasi perpustakaan (Islamy, 2020). Dengan demikian, media sosial berperan penting pada tahap awal proses komunikasi, yaitu memperkenalkan dan menanamkan pengetahuan tentang layanan perpustakaan.

Namun, peningkatan kesadaran tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan pemanfaatan layanan secara langsung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan fisik ke perpustakaan masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa awareness belum sepenuhnya terkonversi menjadi tindakan nyata. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan promosi digital tidak hanya ditentukan oleh jangkauan informasi, tetapi juga oleh faktor-faktor pendukung lain seperti kemudahan akses layanan, jam operasional, dan relevansi koleksi dengan kebutuhan pengguna (SW Dari, 2023).

Rendahnya konversi dari media sosial ke pemanfaatan layanan juga dapat dipahami melalui perspektif perilaku pengguna. Media sosial sering kali berfungsi sebagai sumber informasi awal, sementara keputusan untuk memanfaatkan layanan dipengaruhi oleh



pertimbangan praktis dan kebutuhan aktual pengguna. Oleh karena itu, promosi melalui media sosial perlu diintegrasikan dengan strategi layanan yang memudahkan pengguna, misalnya dengan menampilkan informasi jam layanan, prosedur akses, dan manfaat konkret yang diperoleh pengguna (Rini, 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jenis konten sangat memengaruhi respons pengguna. Konten yang disertai visual menarik, narasi singkat, dan penjelasan manfaat dinilai lebih menarik dibandingkan konten yang hanya berupa dokumentasi formal. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa konten edukatif dan storytelling memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan konten administratif (JIPUS, 2023). Dengan demikian, kualitas pesan dan cara penyajiannya menjadi faktor kunci dalam efektivitas promosi perpustakaan di media sosial.

Selain itu, hasil wawancara mengungkap bahwa interaksi dua arah antara perpustakaan dan pengguna melalui media sosial masih terbatas. Respons terhadap komentar atau pesan sering kali membutuhkan waktu lama karena harus melalui alur koordinasi kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi media sosial sebagai sarana dialog belum sepenuhnya terwujud. Padahal, teori komunikasi digital menekankan pentingnya responsivitas dan interaksi untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dengan audiens (Prameswari, 2024). Keterlambatan respons berpotensi menurunkan minat dan kepuasan pengguna.

Dalam konteks evaluasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas promosi media sosial masih dilakukan secara sederhana, terbatas pada pengamatan jumlah like dan komentar. Belum terdapat indikator yang terstruktur untuk mengukur dampak promosi terhadap pemanfaatan layanan perpustakaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa banyak perpustakaan belum memanfaatkan data analitik media sosial secara optimal dalam pengambilan keputusan strategis (Novita, 2025). Padahal, evaluasi berbasis data penting untuk mengetahui jenis konten yang efektif dan area yang perlu diperbaiki.

Jika dikaitkan dengan teori promosi perpustakaan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perpustakaan DPRD Sumatera Barat masih berada pada tahap awal pemanfaatan media sosial. Media sosial telah digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam strategi promosi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan tantangan umum yang dihadapi perpustakaan kelembagaan di Indonesia dalam mengadopsi teknologi digital (Islamy, 2020).

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi layanan perpustakaan DPRD Sumatera Barat memiliki potensi besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Kekuatan utama terletak pada jangkauan informasi yang luas dan kemampuannya meningkatkan kesadaran pengguna. Sementara itu, kelemahannya terletak pada keterbatasan perencanaan konten, kapasitas SDM, koordinasi kelembagaan, serta sistem evaluasi.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pengembangan strategi promosi media sosial yang lebih terencana, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Perpustakaan perlu memperkuat kolaborasi dengan humas, meningkatkan kompetensi digital pustakawan, serta mengembangkan konten yang tidak hanya informatif tetapi juga persuasif dan interaktif. Dengan langkah tersebut, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan DPRD Sumatera Barat secara berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi layanan perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesadaran dan jangkauan informasi kepada pengguna. Media sosial telah membantu memperkenalkan keberadaan perpustakaan dan layanannya kepada khalayak yang



lebih luas, meskipun pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal dan terencana. Keterbatasan perencanaan konten, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem evaluasi menjadi tantangan utama yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengelolaan media sosial yang berkelanjutan, peningkatan kompetensi digital pustakawan, serta koordinasi yang lebih terstruktur agar media sosial dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana promosi dan peningkatan pemanfaatan layanan perpustakaan DPRD Sumatera Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada pengelola Perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan pihak Humas DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan, informasi, serta waktu untuk proses wawancara dan pengumpulan data. Terima kasih juga disampaikan kepada para informan dan pengguna perpustakaan yang bersedia berbagi pengalaman dan pandangan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan layanan perpustakaan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2019). Strategi komunikasi organisasi publik di era digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 112-124.
- An-Nadzir, M. (2024). Tantangan pengelolaan media sosial pada lembaga pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45-58.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dari, S. W. (2023). Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi perpustakaan di era digital. *Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(1), 21-34.
- Harih, A. (2022). Kompetensi pustakawan dalam pengelolaan media sosial perpustakaan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(2), 89-101.
- Islamy, R. (2020). Transformasi layanan perpustakaan di era teknologi informasi. *Jurnal Kepustakawanan Indonesia*, 4(1), 15-27.
- JIPUS. (2023). Analisis konten media sosial perpustakaan dalam meningkatkan minat pengguna. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 8(2), 66-78.
- Miles, M. B. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novita, Y. (2025). Peran perpustakaan khusus dalam mendukung lembaga legislatif daerah. *Jurnal Perpustakaan Khusus*, 3(1), 1-14.
- Prameswari, D. (2024). Media sosial sebagai alat komunikasi strategis organisasi publik. *Jurnal Komunikasi Digital*, 2(2), 40-52.
- Rini, A. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan layanan perpustakaan instansi pemerintah. *Jurnal Administrasi Informasi*, 7(1), 30-43.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.